

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya buku Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029 ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Substansi Rencana Strategis ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025 2025-2029 serta mengakomodasi isu-isu aktual sektoral dengan memperhatikan parameter-parameter strategis yang memengaruhi kinerja institusi, dianalisis sesuai pedoman yang berlaku, sehingga dapat mendukung visi provinsi Jambi **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**.

Terlepas dari segala kekurangan yang ada dalam proses penyusunannya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi ini, Tahun 2025 – 2029.

Dengan tersusunnya perencanaan jangka menengah ini, kiranya dapat menjadi acuan bagi perencanaan jangka pendek dan landasan perencanaan jangka pendek dan landasan perencanaan operasional bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi serta menjadi ukuran indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah.

Akhir kata, semoga buku Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat memberi manfaat dan menjadi pedoman bagi yang berkepentingan.



Jambi, September 2025

KEPALA BADAN,

Agus Pirngadi, S.Sos

Pembina Utama Madya

NP. 19691215 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	31
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.2.2 Isu Strategis	32
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN....	36
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.....	36
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029.....	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan.....	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	48
BAB V PENUTUP.....	131

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin</i>	21
<i>Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan</i>	21
<i>Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan.....</i>	21
<i>Tabel 2. 4 Rekapitulasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan.....</i>	22
<i>Tabel 2. 5 Pencapaian kinerja tahun 2020 – 2024.....</i>	27
<i>Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan</i>	29
<i>Tabel 2. 7 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah</i>	33
<i>Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah ..</i>	Error!
Bookmark not defined.	
<i>Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah</i>	40
<i>Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....</i>	42
<i>Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....</i>	53
<i>Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan.....</i>	62
<i>Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....</i>	131
<i>Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama.....</i>	134
<i>Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci.....</i>	134

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Kedudukan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah.....</i>	<i>5</i>
<i>Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah</i>	<i>49</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis kinerja, guna mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dihadapkan pada berbagai tantangan strategis, antara lain:

- Masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat,
- Perlunya peningkatan efisiensi belanja dan kualitas perencanaan anggaran,
- Penguatan sistem informasi keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dan real-time,
- Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan berbasis akuntabilitas kinerja.

Seiring dengan perkembangan regulasi nasional seperti pelaksanaan kebijakan fiskal yang berkelanjutan, digitalisasi pelayanan publik, serta transformasi kelembagaan dan sistem pengawasan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi dituntut untuk mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menyelenggarakan fungsi-fungsinya, meliputi perencanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengelolaan aset daerah secara profesional dan berintegritas.

Dengan Renstra 2025-2029 ini, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat berperan lebih strategis dalam mendukung

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi mengacu pada peraturan perundang-undangan Berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75). Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan menteri dalam Negri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, ,Inventarisasi, pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Jambi 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Tahun 2025 – 2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi.

Kedudukan Renstra BKAD dalam hierarki perencanaan daerah mengikuti alur: RPJPD menjadi pedoman RPJMD, RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, yang selanjutnya dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Perangkat Daerah, RKA, dan DPA (lihat Gambar 1.1)

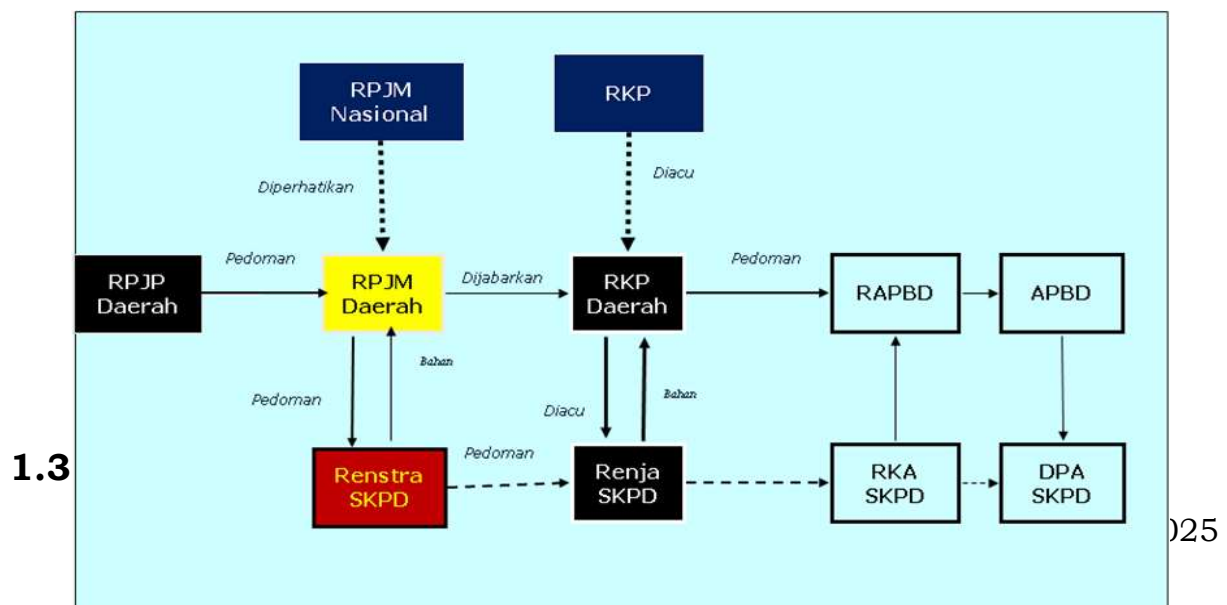
1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra BKAD Provinsi Jambi TAHUN 2025-2029 dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan resmi bagi BKAD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah selama periode 2025-2029
2. Menjabarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi; dan
3. Menjadi arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029).

Gambar 1. 1 Kedudukan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah



1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur di lingkungan BKAD Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran BKAD Provinsi Jambi setiap tahunnya; dan
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Keuangan dan Aser Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra BKAD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 disusun sesuai sistematika paling sedikit sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat daerah.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah; sumber daya perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah; identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, serta penentuan Isu-isu Strategis.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan;
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
 - 2.2.2 Isu Strategis;

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Perangkat daerah.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025 -2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN ISU DAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah. Fokus utamanya adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Pelayanan

1. Perencanaan & Penganggaran

Lingkup ini meliputi penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD, dan laporan realisasi anggaran, serta pemberian asistensi penyusunan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2. Pelaksanaan Anggaran

Lingkup ini meliputi penyelenggaraan penatausahaan kas daerah, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah, serta penyediaan layanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

3. Akuntansi & Pelaporan Keuangan

Lingkup ini meliputi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), konsolidasi laporan keuangan OPD, serta penyajian informasi keuangan kepada publik sesuai asas transparansi.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset)

Lingkup ini meliputi inventarisasi, penilaian, dan pencatatan aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah, serta fasilitasi pemanfaatan, penghapusan, dan pengawasan aset.

5. Pengendalian & Pengawasan

Lingkup ini meliputi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD,

pengawasan kepatuhan OPD dalam pengelolaan anggaran dan aset, serta kemitraan dengan BPK, BPKP, dan Inspektorat dalam kegiatan audit dan pemeriksaan.

6. Pelayanan Publik

Lingkup ini meliputi penyediaan informasi keuangan dan aset daerah kepada masyarakat, layanan konsultasi terkait anggaran, kas daerah, dan aset, serta pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok BKAD Provinsi Jambi berdasarkan **Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025** adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKAD mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan daerah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan daerah;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
5. pelaksanaan tugas di bidang anggaran, akuntansi, pembinaan APBD Kabupaten/Kota, Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah, dan sistem informasi keuangan daerah;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
7. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut, BKAD Provinsi Jambi mempunyai kewenangan:

1. **Perencanaan**, meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. **Pelaksanaan**, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan aset daerah sesuai rencana yang telah ditetapkan.
3. **Pembinaan**, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan tata laksana, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta aparatur pemerintah.
4. **Pelaksanaan administrasi**, meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan guna mendukung kinerja Badan.
5. **Pelaksanaan koordinasi**, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan instansi lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan aset daerah dan pengamanan barang milik daerah.
6. **Pengawasan**, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan penetapan pedoman bagi daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta penggalian sumber-sumber aset baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi aset daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi, dan pelaporan penerimaan.
11. Pelaksanaan manajemen pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2025, BKAD Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Badan, dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, yaitu Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah — tanpa Bidang Pendapatan, karena fungsi

pendapatan daerah telah dipisahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jambi.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan daerah serta aset daerah, memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup Badan dan Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dan pengkajian peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, serta bahan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. Pengoordinasian dan perumusan usulan program, rencana kerja, dan anggaran tahunan Sekretariat dan Badan;
- c. Pengoordinasian dan perancangan standar operasional prosedur pelayanan administrasi lingkup Sekretariat, meliputi pelayanan perencanaan dan pelaporan program, keuangan dan aset, administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman terkait tugas dan fungsi Sekretariat;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkup Badan dan Sekretariat;
- f. Pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan, dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
- h. Pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, peralatan, perlengkapan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. Pembinaan dan pengembangan perencanaan program dan pelaporan, keuangan dan aset, serta administrasi umum dan kepegawaian;
- k. Penyelenggaraan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lingkup Badan, serta laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengembangan pelayanan publik Badan;
- m. Pengoordinasian penyusunan bahan rancangan peraturan, standar operasional prosedur, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- n. Pengoordinasian pengkajian dan verifikasi terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial yang menjadi urusan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Pengoordinasian dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
- p. Pengoordinasian dan fasilitasi pengembangan standar mutu pelayanan kepegawaian melalui lembaga bersertifikasi;

- q. Penyelenggaraan rapat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
- r. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang perencanaan anggaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA-PPAS dan Perubahan KUA/PPAS;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA SKPD/SKPKD dan/atau Perubahan RKA SKPD/SKPKD;
- c. Penyusunan Perda tentang APBD dan/atau Perubahan APBD;
- d. Penyusunan Pergub tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD;
- e. Penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan anggaran daerah SKPD/SKPKD;
- f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran aset daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- h. Pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan daerah;
- i. Pelaksanaan evaluasi APBD Kabupaten/Kota dan evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi antara lain: penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD, dan PPKD; pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan dan pengeluaran kas daerah; pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi; pengoordinasian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD, dan PPKD; penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; pelaksanaan rekonsiliasi realisasi aset, belanja, serta pembiayaan; penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah; penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah; pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; serta pembinaan dan sosialisasi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Badan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan, dan bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi antara lain: menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran; melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi penerimaan dan pengeluaran (kas dan non-kas) yang dilakukan SKPD; menyiapkan bahan penyesuaian transaksi

non-kas; melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD non-BLUD, BLUD, dan PPKD; menyusun laporan realisasi APBD periodik dan prognosis semesteran; menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan; menyusun ikhtisar kinerja keuangan pemerintah provinsi dan ikhtisar laporan keuangan BUMD; menyusun bahan tanggapan terhadap LHP BPK dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

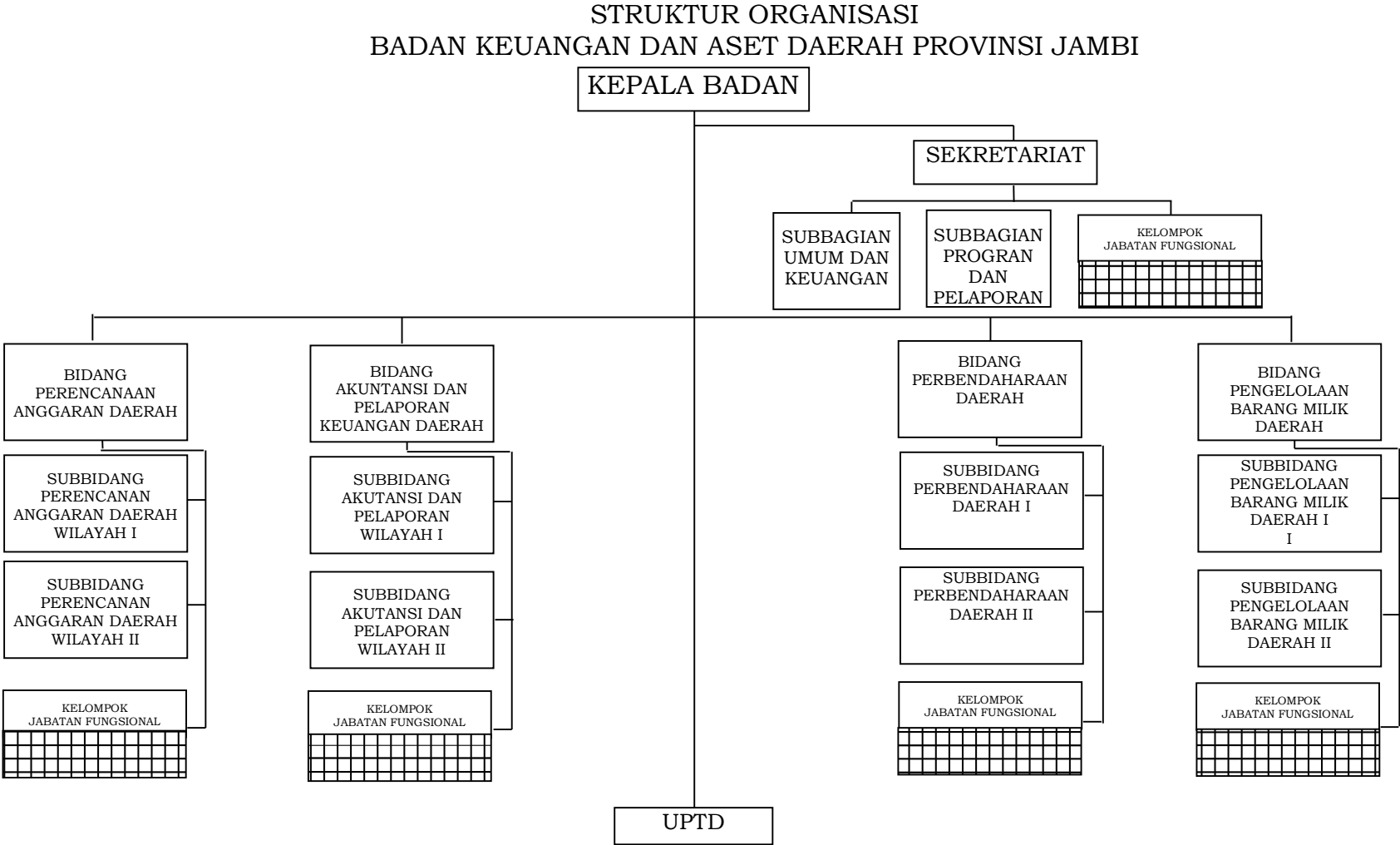
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan, standar harga barang, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan BMD, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang; pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan RKBMD dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD; pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah; pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi, pengamanan fisik, administrasi, dan hukum barang milik daerah; pelaksanaan koordinasi penyiapan dokumen usulan pemanfaatan dan

pemindahtanganan BMD serta hasil penilaian BMD; penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; pengoordinasian rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. Susunan organisasi BKAD Provinsi Jambi berdasarkan Pergub 29/2025 Pasal 5 terdiri dari: Kepala Badan; Sekretariat (Subbagian Umum dan Keuangan; Subbagian Program dan Pelaporan; Kelompok Jabatan Fungsional); Bidang Perencanaan Anggaran Daerah (Subbidang Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I dan II); Bidang Perbendaharaan Daerah (Subbidang Perbendaharaan Daerah I dan II); Bidang Akuntansi dan Pelaporan (Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I dan II); Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Subbidang Pengelolaan Barang Milik Daerah I dan II); dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi B Provinsi Jambi didukung oleh sumber daya manusia sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
PNS	43 Orang	34 Orang	77 Orang
PTT	22 Orang	23 Orang	45 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tabel 2. 2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	11	7	18
2.	Strata 1 (S1)	24	22	46
3.	Diploma 3	3	4	6
4.	SLTA	4	2	6
Jumlah		42	35	77

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan.

Tabel 2. 3 Rekapitulasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	10

4	Fungsional Umum	61
Jumlah		77

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV d	1
2	IV/b	3
3	IV/a	8
4	III/d	39
5	III/c	16
6	III/b	6
7	III/a	1
8	II/d	2
9	II/c	1
Jumlah		77

A. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pada BKAD merujuk pada fasilitas yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sarana adalah fasilitas yang digunakan langsung dalam proses kerja (perlengkapan kantor, kendaraan dinas, alat kerja lainnya), sedangkan prasarana adalah fasilitas penunjang sarana (bangunan/ruang kantor, listrik, air bersih, jaringan komunikasi). Rincian sarana dan prasarana/aset yang dimiliki BKAD antara lain:

1. Gedung dan bangunan.

Bangunan gedung kantor, gudang, instalasi, tempat pertemuan, pos jaga, garasi/pool, gedung fasilitas umum, bangunan parkir, dan bangunan tempat tinggal.

2. Peralatan dan inventarisasi Kantor.

Komputer, printer, mesin fotokopi, meja kursi, dan lemari arsip yang mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari; seluruh aset dicatat dan dikelola melalui sistem inventarisasi.

3. Kendaraan/operasional

Kendaraan roda empat dan roda dua untuk mendukung mobilitas pegawai dan kegiatan operasional lapangan.

4. Sarana penunjang lainnya.

Jaringan internet, sistem keamanan (CCTV), perangkat audio-visual, serta perlengkapan kebersihan dan kesehatan lingkungan kerja.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode lima tahun terakhir, BKAD Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah, dengan tujuan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja sesuai Renstra periode sebelumnya (2021-2026), sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana. Gambaran pencapaian kinerja BKAD Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.5, dan realisasi pendanaan pelayanan pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 5 Pencapaian kinerja tahun 2020 – 2024

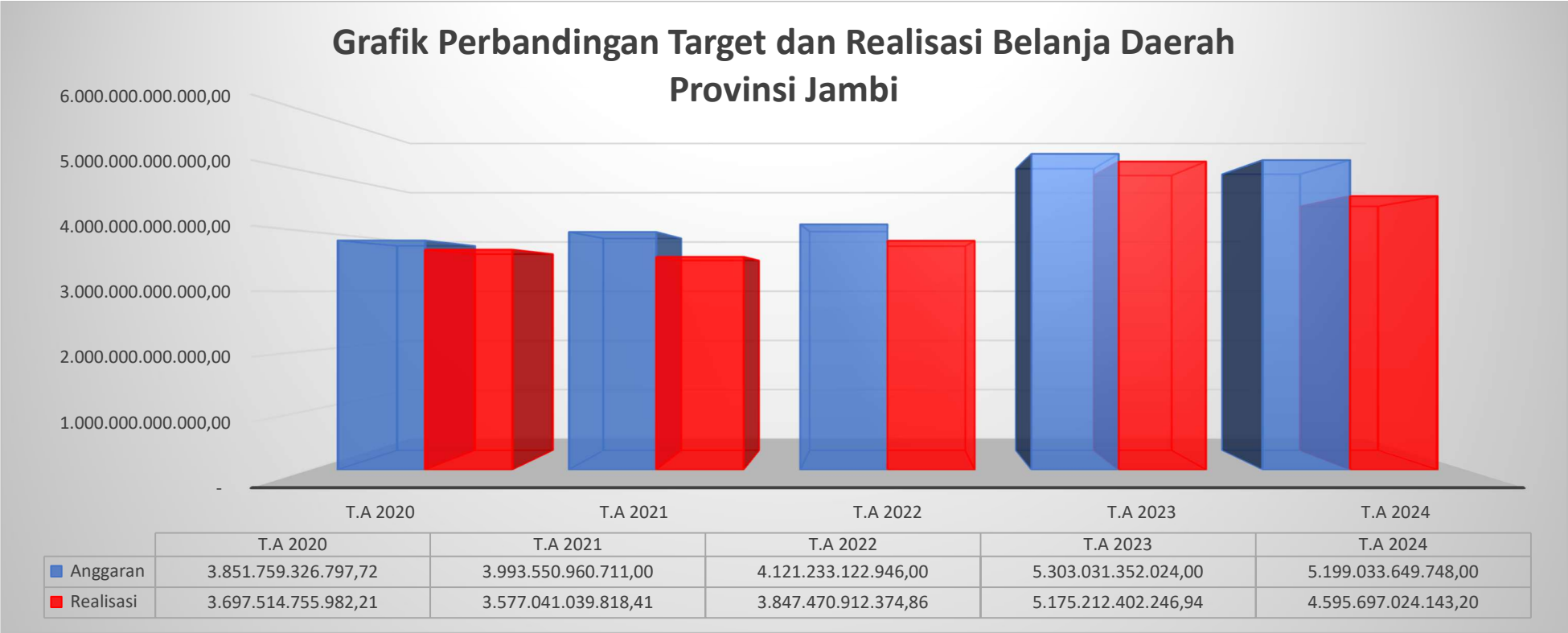
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi						
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Skor IKM	Nilai	86,40	86,60	86,80	87,00	86,53	86,80	86,95	87,15
2	Predikat AKIP	Nilai	74,00	75,00	76,00	79,00	74,35	80,15	81,96	81,10
3	OPINI BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	%	0,00%	79,50%	84,62%	89,74%	0,00%	81,70%	86,80%	90,30%
5	Kontribusi Barang Milik Daerah terhadap PAD	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Nilai AKIP Perangkat Daerah			72,00%		75,11				75,11
7	Persentase Belanja Pegawai di Luar TKD					84,09				84,09
8	Persentase Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik					20,18				20,18
9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja					100,00				100,00

	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					94,57				94,57
10	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu					100,00				100,00
11	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap					16,71				16,71

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Program Renstra Perangkat Daerah	Satuan	Target Pagu Anggaran Perangkat Daerah Pada Tahun Ke			Realisasi Pagu Anggaran Pada Tahun ke			Persentase Capaian Pada Tahun ke (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	9	10	11	14	15	16
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rupiah	91.672.684.421,00	92.618.563.667,00	90.604.976.871,00	85.963.327.661,00	91.272.962.253,00	86.643.416.995,83	93,77%	98,55%	95,63%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rupiah	930.372.875.165,00	1.085.957.954.244,00	1.063.045.019.397,00	937.131.971.672,00	1.077.933.259.499,00	797.672.945.518,00	100,73%	99,26%	75,04%
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rupiah	3.084.088.864,00	3.094.945.706,00	2.774.473.849,00	3.187.308.152,00	2.626.552.793,00	2.425.551.743,00	103,35%	84,87%	87,42%

Gambar 2.2 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi meliputi:

1. Perangkat Daerah (OPD/SKPD)

Sebagai pengguna layanan penganggaran, penatausahaan keuangan, akuntansi/pelaporan, dan pengelolaan aset.

2. Pemerintah Kabupaten /Kota se-Provinsi Jambi

Dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Dalam konsolidasi laporan keuangan.

4. DPRD Provinsi Jambi

Dalam pembahasan dan pertanggungjawaban APBD.

5. Masyarakat dan dunia usaha

Sebagai penerima manfaat transparansi informasi keuangan dan aset daerah, serta mitra dalam pemanfaatan aset daerah.

6. Pemerintah Pusat

Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan lembaga terkait membutuhkan data keuangan daerah, laporan realisasi APBD, serta laporan barang milik daerah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain:

1. Perencanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi perencanaan program/kegiatan antar-OPD belum optimal. Kualitas usulan anggaran dari OPD masih rendah Sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan antar-OPD belum optimal, kualitas usulan anggaran dari OPD masih rendah sehingga menimbulkan banyak revisi, dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan dan penganggaran masih terbatas.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan

Pencairan anggaran masih kerap terlambat akibat kelengkapan administrasi yang kurang memadai dari OPD, kapasitas sumber daya manusia bendahara dan pengelola keuangan di OPD masih bervariasi, dan proses birokrasi pelayanan keuangan daerah relatif panjang.

3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Konsolidasi laporan keuangan dari OPD masih sering terlambat, kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan masih terdapat temuan pemeriksaan BPK terkait penyajian laporan keuangan.

4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Inventarisasi aset daerah belum sepenuhnya tertib dan akurat, masih terdapat sengketa dan ketidakjelasan status kepemilikan aset daerah, serta pemanfaatan aset daerah melalui sewa dan kerja sama belum optimal sehingga berpotensi menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Kualitas dan jumlah sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset masih terbatas, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan belum optimal, dan kebutuhan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM masih tinggi.

6. Pelayanan Publik

Keterbukaan informasi keuangan dan aset kepada masyarakat masih terbatas, mekanisme pengaduan masyarakat terkait aset dan keuangan daerah belum berjalan efektif, dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur layanan BKAD masih rendah.

2.2.2 Isu Strategis

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi APBD semakin tinggi; Perlunya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah untuk mempertahankan/meraih opini WTP dari BPK.

2. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset)

Inventarisasi dan pensertifikatan aset daerah belum sepenuhnya tertib; masih terdapat aset yang idle, tidak dimanfaatkan optimal, atau berpotensi hilang karena sengketa; pemanfaatan aset untuk mendukung PAD masih rendah.

3. Kualitas SDM Pengelola Keuangan dan Aset

Keterbatasan kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual dan pengelolaan aset; tingginya kebutuhan pelatihan dan sertifikasi bendahara/pengelola barang.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem informasi keuangan dan aset (SIPD/aplikasi pengelolaan BMD) belum terintegrasi penuh; rendahnya literasi digital sebagian aparatur pengelola keuangan dan aset.

5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Belum optimalnya perencanaan anggaran berbasis kinerja; masih ditemui program/kegiatan yang kurang selaras dengan prioritas pembangunan daerah; serapan anggaran OPD sering terkonsentrasi di akhir tahun.

6. Pengawasan dan Kepatuhan Regulasi

Masih ditemui temuan pemeriksaan BPK terkait kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan; perlunya penguatan fungsi monitoring, evaluasi, dan pembinaan keuangan/aset terhadap OPD.

7. Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi Aset

Aset daerah yang belum dimanfaatkan maksimal sebagai sumber pendapatan sah daerah; belum berkembangnya pola kerja sama pemanfaatan aset dengan dunia usaha (kerja sama pemanfaatan/KSP, bangun guna serah/BGS, dan bentuk lain).

Tabel 2. 7 Teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis - Global	Isu Lingkungan Dinamis - Nasional	Isu Lingkungan Dinamis - Regional	Isu Strategis Perangkat Daerah (dan Keterkaitan Sasaran RPJMD 2025-2029)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan dan Penganggaran	Sinkronisasi perencanaan antar-OPD kurang optimal, kualitas usulan anggaran rendah, pemanfaatan SIPD belum maksimal	Efisiensi pemanfaatan sumber daya	Tuntutan transparansi tata kelola keuangan global	Kebijakan nasional penganggaran berbasis kinerja	Kebijakan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja. Terkait Sasaran RPJMD: Meningkatnya tata kelola anggaran (Program 5.02.02 - Persentase Belanja Pegawai di Luar TKD; Persentase Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik).
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Keterlambatan pencairan anggaran, kapasitas bendahara bervariasi, birokrasi panjang	Efisiensi birokrasi	Good governance dan akuntabilitas keuangan	Kebijakan SP2D online dan digitalisasi transaksi keuangan	Kebijakan efisiensi belanja daerah	Optimalisasi penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Terkait Sasaran RPJMD: Meningkatnya tata kelola perbendaharaan (Program 5.02.02 - Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar).
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Keterlambatan konsolidasi laporan OPD, kualitas laporan belum sesuai SAP, masih ada temuan BPK	Akuntabilitas tata kelola	Standar akuntansi internasional	SAP berbasis akrual dan target WTP	Transparansi laporan keuangan daerah	Meningkatkan kualitas laporan keuangan menuju opini WTP. Terkait Sasaran RPJMD: Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan (Program 5.02.02 - Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu).
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi aset belum tertib dan akurat, sengketa dan ketidakjelasan status kepemilikan aset, pemanfaatan aset melalui sewa/kerja sama belum optimal	Konservasi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya aset daerah	Tuntutan tata kelola aset publik yang transparan	Kebijakan nasional optimalisasi aset dan peningkatan PAD	Kebijakan pembangunan daerah berbasis aset produktif	Optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dan peningkatan pendapatan melalui pemanfaatan aset. Terkait Sasaran RPJMD: Meningkatnya tata kelola aset daerah (Program 5.02.03 - Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap).
Sumber Daya Manusia dan Teknologi	Kompetensi SDM belum merata, keterbatasan literasi digital, kebutuhan pelatihan tinggi	Peningkatan kapasitas SDM	Transformasi digital global	SPBE dan digitalisasi pelayanan publik	Penguatan kompetensi SDM daerah	Penguatan kapasitas SDM dan integrasi teknologi informasi. Mendukung pencapaian Sasaran RPJMD: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel (Program 5.02.01 - Nilai AKIP Perangkat Daerah).
Pelayanan Publik	Keterbukaan informasi masih terbatas, mekanisme pengaduan belum optimal	Pelayanan publik yang transparan	Tuntutan global terhadap open government	UU KIP, reformasi	Kebijakan pelayanan publik daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis transparansi dan partisipasi. Terkait Sasaran

	rendahnya pemahaman masyarakat			birokrasi, SP4N-LAPOR		RPJMD: Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel (Program 5.02.01 - Indeks Kepuasan Masyarakat; Nilai AKIP Perangkat Daerah).
--	--------------------------------	--	--	-----------------------	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan pembangunan daerah, BKAD menetapkan tujuan strategis sebagai bagian dari Renstra lima tahunan. Tujuan ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap berbagai program dan kegiatan, serta memastikan sinergi antara kebijakan daerah dan prioritas pembangunan nasional. Tujuan Perangkat Daerah mencerminkan hasil yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur dalam periode perencanaan, serta menjadi dasar dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, dan target capaian tahunan.

Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, Tujuan Renstra BKAD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.”**

Sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, BKAD Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran berikut, yang mencakup baik sasaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah maupun sasaran pada program teknis/substantif BKAD (Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah), agar konsisten dengan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD-Renstra pada Gambar 3.2.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,11	75,50	76,00	78,00	80,00	81,00	81,50
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	94,80	94,90	95,00	95,10	95,20	95,30	95,40
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	86,20	86,40	86,60	86,80	87,00	87,20
	Meningkatnya tata kelola anggaran (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	84,09	84,09	80	30	30	30	30
		Persentase Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	20,18	20,18	20,80	21,00	21,20	21,50	21,80
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	94,57	94,57	94,65	95,00	95,30	95,30	96,50
		Persentase Penurunan SILPA (%)	-16,17	-16,17	-16,17	-16,17	-16,17	-16,17	-16,17
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan (Program Pengelolaan Keuangan Daerah)	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029

A. Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra BKAD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan komprehensif berisi langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dengan strategi pembangunan Provinsi Jambi secara keseluruhan. Rumusan strategi BKAD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, memperkuat integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan sistem keuangan daerah, serta menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang mendukung prioritas pembangunan daerah.

2. Bidang Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penatausahaan keuangan, mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah (*cashless government*), serta mempercepat proses pencairan anggaran melalui penyederhanaan birokrasi.

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan OPD, serta menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK setiap tahun.

4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Strategi ini diarahkan untuk mempercepat inventarisasi dan pensertifikatan aset daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD, mengembangkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, serta meminimalkan sengketa aset daerah melalui tertib administrasi dan pengawasan.

5. Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan aset melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi, memperkuat literasi digital dan keterampilan pengelolaan sistem informasi keuangan, serta mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi.

6. Bidang Pelayanan Publik

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi keuangan dan aset kepada masyarakat, memperkuat mekanisme pengaduan dan layanan konsultasi publik terkait keuangan dan aset, serta mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel berbasis teknologi digital.

B. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra BKAD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD, selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra BKAD Provinsi Jambi 2025-2029.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Indikator	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai AKIP Perangkat Daerah	75,11	75,50	76,00	77,83	79,67	81,50
Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	94,80	94,90	95,00	95,10	95,20	95,30
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,00	86,20	86,40	86,60	86,80	87,00
Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	84,09	84,09	80	30	30	30
Persentase Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	20,18	20,18	20,80	21,00	21,20	21,50
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	94,57	94,57	95,50	95,75	96,00	96,25
Persentase Penurunan SILPA (%)	-16,17	-16,17	-16,17	-16,17	-16,17	-16,17
Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	16,71	16,71	16,83	16,90	16,92	16,95

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Meningkatkan penerapan SAKIP	Peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan BKAD melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
2	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatkan pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Optimalisasi penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan untuk meraih opini WTP
3	Perencanaan, Pengelolaan, dan Pengawasan Keuangan	Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pengawasan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Pengembangan aplikasi keuangan daerah dan integrasi sistem berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi
4	Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis e-government	Penguatan tata kelola kelembagaan BKAD melalui penerapan e-government dan simplifikasi proses kerja
5	SPBE dan Infrastruktur TIK	Penerapan kebijakan internal arsitektur SPBE, jaringan intra, sistem penghubung layanan, dan kebijakan audit teknologi informasi	Penyusunan kebijakan internal SPBE dan penguatan infrastruktur jaringan intra untuk mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah
6	Pelayanan Publik	Menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, prima, dan terjangkau	Penyediaan layanan digital BKAD (pelaporan, informasi keuangan, aset) yang mudah diakses oleh publik

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
7	Manajemen Informasi dan Aset	Menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, dan manajemen aset TIK dalam rangka meningkatkan SPBE	Pengelolaan data aset daerah secara digital dan penguatan keamanan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah
8	SDM dan Manajemen Pengetahuan SPBE	Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pengetahuan mengenai SPBE	Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM BKAD dalam penguasaan aplikasi SPBE dan manajemen aset/keuangan
9	Pengaduan Masyarakat	Memberikan wadah/saluran pengaduan bagi masyarakat	Penguatan sistem pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan aset melalui aplikasi pengaduan digital

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan serta telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut menjadi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yaitu :

A. Program

1. Pengelolaan keuangan daerah
2. Pengelolaan barang milik daerah

B. Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
7. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.
9. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

C. Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.

2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
4. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan.
5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
6. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.
7. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
8. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota.
9. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
10. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
11. Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi.
12. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
13. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
14. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
15. Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
16. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
17. Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
18. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan

Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

19. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.
20. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
21. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
22. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
23. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
24. Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
25. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
26. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
27. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
28. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
29. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.

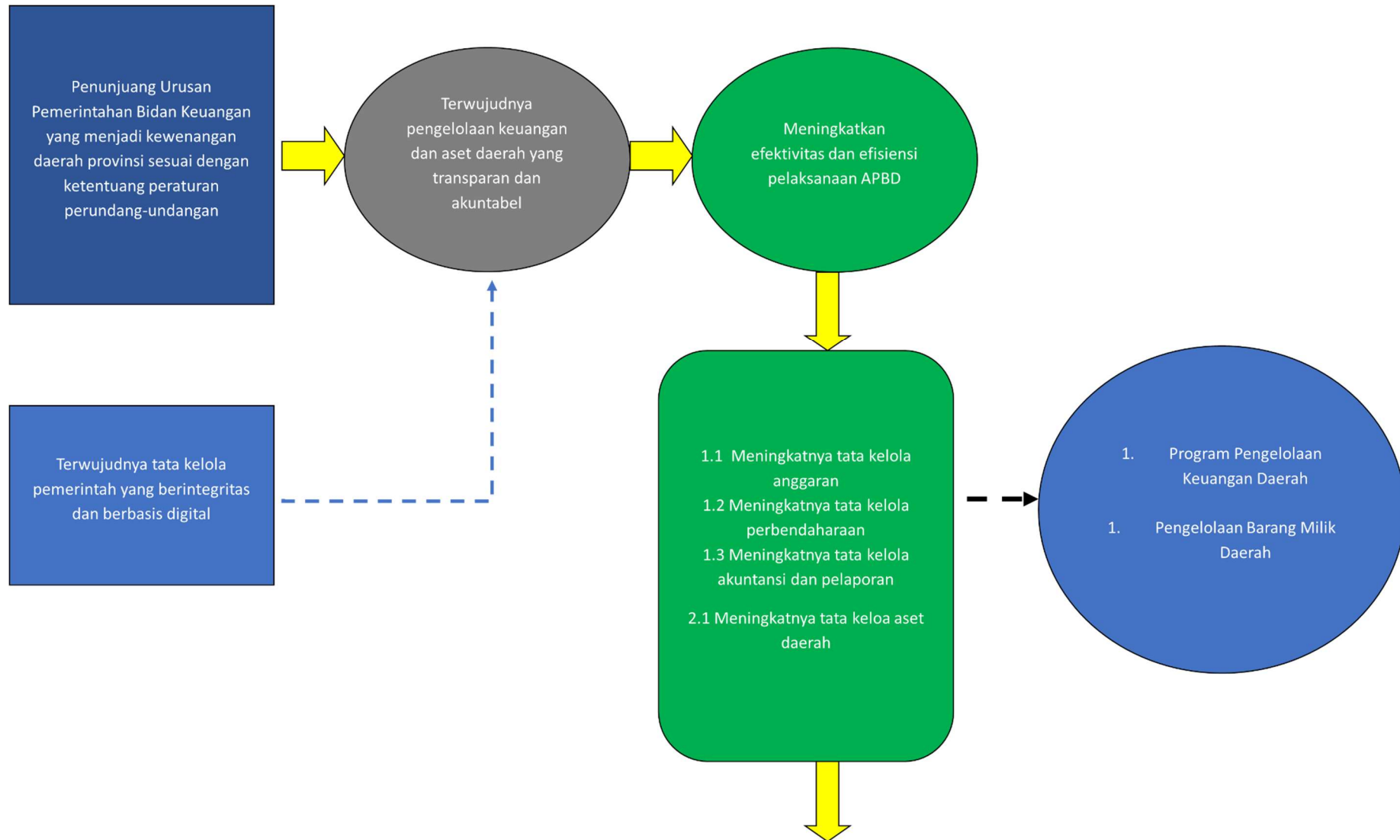
30. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
31. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
32. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
33. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
34. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
35. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
36. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi.
37. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
38. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi.
39. Penyusunan Standar Harga.
40. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah.
41. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.
42. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
43. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
44. Inventarisasi Barang Milik Daerah.
45. Pengamanan Barang Milik Daerah.
46. Penilaian Barang Milik Daerah.
47. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah.
48. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
49. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
50. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

51. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah — diagram alur pada dokumen sumber tidak dapat direproduksi secara tekstual (hasil ekstraksi PDF tidak terbaca); kerangka cascading yang sama disajikan secara terstruktur pada Tabel 4.1 berikut.

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah





1. Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
 - 1.1. Tersusunnya KUA dan PPAS
 - 1.2. Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 1.3. Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 1.4. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 1.5. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 1.6. Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
2. Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 - 2.2. Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
3. Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 3.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 3.3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi
4. Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 4.1. Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 4.2. Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 4.3. Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 4.4. Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 4.5. Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - 4.6. Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan



1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 1.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - 1.4. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - 1.5. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - 1.6. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi
2. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
 - 2.2. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota
3. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - 3.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - 3.3. Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi
4. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 4.1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - 4.2. Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
 - 4.3. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - 4.4. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - 4.5. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya



6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

6.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

6.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban

6.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

6.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

6.6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

6.7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan

Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

6.8. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

6.9. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

6.10. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

6.11. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi

6.12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi

7. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

7.1. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel				Opini BPK Atas Laporan Keuangan		
		Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		
			Meningkatnya tata kelola anggaran		Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					Persentase Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik		
				Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah yang Disusun Dokumen KUA dan PPAS	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
				Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
				Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusun tepat waktu	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		Pesentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
					Persentase Penurunan SILPA		
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
				Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
				Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
				Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
				Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
				Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
				Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu		
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Pertanggung Jawaban APBD Kab/Kota yang disusun tepat waktu	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase penyelesaian administrasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
				Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	
				Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	
			Meningkatnya tata kelo a aset daerah		Persentase penambahan Nilai Aset Tetap	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Penyusunan Standar Harga	
				Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan /Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02 - KEUANGAN				1.043.095.9 42.137		1.254.328.9 79.816		1.502.547.053. 574		1.798.695.0 83.731		2.154.358.26 2.018		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				25.995.752. 774		33.273.394. 460		37.524.996.099		42.144.918. 066		47.362.020.6 66		
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,11	76	93,515,7309 83	76,00	121,992,902 ,615	77,83	118,765,771,11 8	79,67	134,122,092 ,119	81,50	151,795,556, 498,00	5.02.0.00.0.00. 01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan	94,8	95		95,1		95,2		95,3		95,4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Publik kategori PD (Nilai)													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86,4		86,6		86,8		87		87,2			
5.02.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				495.964.527		656.592.291		867.910.749		1.001.492.899		1.126.987.719		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	495.964.527	4	656.592.291	4	867.910.749	4	1.001.492.899	4	1.126.987.719		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.1.01.000 1 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100.497.475		220.846.390		345.015.668		374.018.802		374.018.802		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	100.497.475	4	220.846.390	4	345.015.668	4	374.018.802	4	374.018.802		
5.02.01.1.01.000 6 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				262.867.052		276.625.901		331.951.081		398.341.297		478.009.557		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	5	5	262.867.052	5	276.625.901	5	331.951.081	5	398.341.297	5	478.009.557		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
5.02.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				132.600.000		159.120.000		190.944.000		229.132.800		274.959.360		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	132.600.000	2	159.120.000	2	190.944.000	2	229.132.800	2	274.959.360		
5.02.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				16.817.835.666		19.594.850.636		20.915.743.510		22.300.814.960		23.762.900.698		
Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97	97	16.817.835.666	97	19.594.850.636	97	20.915.743.510	97	22.300.814.960	97	23.762.900.698		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.1.02.000 1 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15.990.386. 266		17.990.386. 266		18.990.386.266		19.990.386. 266		20.990.386.2 66		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	97	97	15.990.386. 266	97	17.990.386. 266	97	18.990.386.266	97	19.990.386. 266	97	20.990.386.2 66		
5.02.01.1.02.000 2 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				813.158.400		1.570.165.6 34		1.884.198.761		2.261.038.5 14		2.713.246.21 6		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	813.158.400	4	1.570.165.6 34	4	1.884.198.761	4	2.261.038.5 14	4	2.713.246.21 6		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14.291.000		34.298.736		41.158.483		49.390.180		59.268.216		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	14.291.000	1	34.298.736	1	41.158.483	1	49.390.180	1	59.268.216		
5.02.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				412.857.864		495.435.058		594.522.070		713.426.484		856.111.780		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4	4	412.857.864	4	495.435.058	4	594.522.070per sentase laporan	4	713.426.484	4	856.111.780		
	Jumlah Dokumen Hasil	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.1.03.000 1 - Penyusunan				33.358.980		40.036.398		48.043.678		57.652.413		69.182.896		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	33.358.980	2	40.036.398	2	48.043.678	2	57.652.413	2	69.182.896		
5.02.01.1.03.000 2 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	12	12	75.000.000	12	90.000.000	12	108.000.000	12	129.600.000	12	155.520.000		
5.02.01.1.03.000 3 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				64.498.945		77.398.734		92.878.481		111.454.177		133.745.012		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang	4	4	64.498.945	4	77.398.734	4	92.878.481	4	111.454.177	4	133.745.012		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Milik Daerah SKPD	Milik Daerah SKPD (Laporan)													
5.02.01.1.03.000 4 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				89.999.939		107.999.926		129.599.911		155.519.894		186.623.872		
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	89.999.939	4	107.999.926	4	129.599.911	4	155.519.894	4	186.623.872		
5.02.01.1.03.000 5 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	75.000.000	4	90.000.000	4	108.000.000	4	129.600.000	4	155.520.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.03.000 7 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				75.000.000		90.000.000		108.000.000		129.600.000		155.520.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	4	75.000.000	4	90.000.000	4	108.000.000	4	129.600.000	4	155.520.000		
5.02.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				493.527.300		826.102.560		931.323.072		1.057.587.6 86		1.209.105.22 4		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	493.527.300	1	826.102.560	1	931.323.072	1	1.057.587.6 86	1	1.209.105.22 4		
	Jumlah ASN yang Dipindahtugaska n (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	20		20		20		20		20			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.1.05.000 1 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				125.000.000		150.000.000		180.000.000		216.000.000		259.200.000		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana	2	2	125.000.000	2	150.000.000	2	180.000.000	2	216.000.000	2	259.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Prasarana Disiplin Pegawai	Disiplin Pegawai (Unit)													
5.02.01.1.05.000 2 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				64.020.000		76.824.000		92.188.800		110.626.560		132.751.872		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	64.020.000	1	76.824.000	1	92.188.800	1	110.626.560	1	132.751.872		
5.02.01.1.05.000 5 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				121.898.800		146.278.560		175.534.272		210.641.126		252.769.352		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	121.898.800	12	146.278.560	12	175.534.272	12	210.641.126	12	252.769.352		
5.02.01.1.05.000 8 - Pemindahan Tugas ASN				40.000.000		48.000.000		57.600.000		69.120.000		82.944.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan (Orang)	10	10	40.000.000	10	48.000.000	10	57.600.000	10	69.120.000	10	82.944.000		
5.02.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				55.108.500		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	20	55.108.500	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000	20	300.000.000		
5.02.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				87.500.000		105.000.000		126.000.000		151.200.000		181.440.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	87.500.000	10	105.000.000	10	126.000.000	10	151.200.000	10	181.440.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Undangan (Orang)													
5.02.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.664.904.909		3.368.136.646		4.043.763.974		4.853.516.771		5.824.220.124		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.664.904.909	1	3.368.136.646	1	4.043.763.974	1	4.853.516.771	1	5.824.220.124		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor yang Disediakan (Paket)													
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
5.02.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				30.108.220		72.064.932		86.477.918		103.773.502		124.528.202		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	7	7	30.108.220	7	72.064.932	7	86.477.918	7	103.773.502	7	124.528.202		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disediakan (Paket)													
5.02.01.1.06.000 2 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				902.829.814		1.083.395.777		1.300.074.932		1.560.089.919		1.872.107.902		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	902.829.814	10	1.083.395.777	10	1.300.074.932	10	1.560.089.919	10	1.872.107.902		
5.02.01.1.06.000 4 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				425.703.200		510.843.840		613.012.608		735.615.130		882.738.156		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	425.703.200	1	510.843.840	1	613.012.608	1	735.615.130	1	882.738.156		
5.02.01.1.06.000 5 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				86.236.875		1.172.972.097		1.407.566.516		1.689.079.820		2.026.895.784		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	86.236.875	4	1.172.972.097	4	1.407.566.516	4	1.689.079.820	4	2.026.895.784		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.06.000 6 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan				6.031.800		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	6.031.800	4	15.000.000	4	20.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000		
5.02.01.1.06.000 8 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.550.000		13.860.000		16.632.000		19.958.400		23.950.080		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	11.550.000	12	13.860.000	12	16.632.000	12	19.958.400	12	23.950.080		
5.02.01.1.06.000 9 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				202.445.000		500.000.000		600.000.000		720.000.000		864.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12	12	202.445.000	12	500.000.000	12	600.000.000	12	720.000.000	12	864.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)													
5.02.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.817.481.810		3.380.978.172		4.057.173.806		4.868.608.568		5.842.330.281		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3	2.817.481.810	3	3.380.978.172	3	4.057.173.806	3	4.868.608.568	3	5.842.330.281		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	yang Disediakan (Unit)													
5.02.01.1.07.000 1 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.200.000.000		1.440.000.000		1.728.000.000		2.073.600.000		2.488.320.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3	3	1.200.000.000	3	1.440.000.000	3	1.728.000.000	3	2.073.600.000	3	2.488.320.000		
5.02.01.1.07.000 2 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.200.000.000		1.440.000.000		1.728.000.000		2.073.600.000		2.488.320.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	3	1.200.000.000	3	1.440.000.000	3	1.728.000.000	3	2.073.600.000	3	2.488.320.000		
5.02.01.1.07.000 6 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				417.481.810		500.978.172		601.173.806		721.408.568		865.690.281		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	417.481.810	10	500.978.172	10	601.173.806	10	721.408.568	10	865.690.281		
5.02.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.342.363.17		1.617.760.260		1.944.312.312		2.335.174.775		2.803.209.730		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.342.363.17	12	1.617.760.260	12	1.944.312.312	12	2.335.174.775	12	2.803.209.730		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.1.08.0001 - Penyediaan				2.562.900		10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jasa Surat Menyurat														
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.562.900	12	10.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000		
5.02.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				162.989.000		195.586.800		234.704.160		281.644.992		337.973.990		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	162.989.000	12	195.586.800	12	234.704.160	12	281.644.992	12	337.973.990		
5.02.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.176.811.217		1.412.173.460		1.694.608.152		2.033.529.783		2.440.235.740		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.176.811.217	12	1.412.173.460	12	1.694.608.152	12	2.033.529.783	12	2.440.235.740		
5.02.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik				1.950.817.581		3.333.538.837		4.170.246.606		5.014.295.923		5.937.155.110		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	20	1.950.817.5 81	20	3.333.538.8 37	20	4.170.246.606	20	5.014.295.9 23	20	5.937.155.11 0		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	69	69		69		69		69		69			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.01.1.09.000 1 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				600.318.364		720.382.037		864.458.444		1.037.350.133		1.244.820.160		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	69	69	600.318.364	69	720.382.037	69	864.458.444	69	1.037.350.133	69	1.244.820.160		
5.02.01.1.09.000 2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.176.811.217		1.963.156.800		2.355.788.160		2.826.945.792		3.392.334.950		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas	20	20	1.176.811.217	20	1.963.156.800	20	2.355.788.160	20	2.826.945.792	20	3.392.334.950		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
5.02.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				67.200.000		150.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	150	150	67.200.000	150	150.000.000	150	200.000.000	150	250.000.000	150	300.000.000		
5.02.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				106.488.000		500.000.000		750.000.002		899.999.998		1.000.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	106.488.000	1	500.000.000	1	750.000.002	1	899.999.998	1	1.000.000.000		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN				1.011.004.189.363		1.214.045.585.356		1.456.420.057.475		1.747.279.165.665		2.096.334.241.352		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEUANGAN DAERAH														
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	1.521.499.169	100	2.314.217.704	100	2.619.723.638	100	2.978.464.075	100	3.400.692.747	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.02.1.04 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.699.049.638		2.642.284.602		2.942.898.836		3.292.244.067		3.699.497.139		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	4	4	849.524.819	4	1.520.785.931	4	1.681.075.182	4	1.866.229.067	4	2.080.861.002		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Orang)	172	172		172		172		172		172			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tinda k Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan	10	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kerugian Daerah (Dokumen)													
	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.1.04.000 1 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				0		79.857.451		83.850.305		88.042.813		92.444.972		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	4	4	0	4	79.857.451	4	83.850.305	4	88.042.813	4	92.444.972		
5.02.02.1.04.000 2 - Rekonsiliasi dan Verifikasi				161.031.654		168.903.502		177.348.638		186.216.054		195.526.896		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	12	12	161.031.654	12	168.903.502	12	177.348.638	12	186.216.054	12	195.526.896		
5.02.02.1.04.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				0		79.857.451		83.850.305		88.042.813		92.444.972		
Terlaksananya Konsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD,	4	4	0	4	79.857.451	4	83.850.305	4	88.042.813	4	92.444.972		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)													
5.02.02.1.04.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi				279.941.337		335.929.604		403.115.525		483.738.630		580.486.356		
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan	2	2	279.941.337	2	335.929.604	2	403.115.525	2	483.738.630	2	580.486.356		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi (Dokumen)													
5.02.02.1.04.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				103.992.336		109.075.883		114.529.651		120.256.124		126.268.955		
Tersedianya Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindakan Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	103.992.336	1	109.075.883	1	114.529.651	1	120.256.124	1	126.268.955		
5.02.02.1.04.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian				188.115.215		385.453.165		438.586.523		501.148.720		574.965.659		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	10	10	188.115.215	10	385.453.165	10	438.586.523	10	501.148.720	10	574.965.659		
5.02.02.1.04.000 9 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				116.444.277		122.136.522		128.243.320		134.655.474		141.388.276		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	1	1	116.444.277	1	122.136.522	1	128.243.320	1	134.655.474	1	141.388.276		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Daerah (Dokumen)													
5.02.02.1.04.001 0 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				0		79.857.451		83.850.305		88.042.813		92.444.972		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	0	1	79.857.451	1	83.850.305	1	88.042.813	1	92.444.972		
5.02.02.1.04.001 1 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa ban Pemerintah Provinsi				0		79.857.451		83.850.305		88.042.813		92.444.972		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan	172	172	0	172	79.857.451	172	83.850.305	172	88.042.813	172	92.444.972		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ban Pemerintah Provinsi	Pertanggungjawa ban Pemerintah Provinsi (Orang)													
5.02.02.1.04.001 2 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi				0		79.857.451		83.850.305		88.042.813		92.444.972		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina (Lembaga)	3	3	0	3	79.857.451	3	83.850.305	3	88.042.813	3	92.444.972		
5.02.02.1.06 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				667.813.743		801.376.491		961.651.791		1.153.982.1 49		1.384.778.57 9		
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	129	129	333.906.871	129	400.688.245	129	480.825.895	129	576.991.074	129	692.389.289		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.1.06.000 3 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi				333.906.871		400.688.245		480.825.895		576.991.074		692.389.289		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	129	129	333.906.871	129	400.688.245	129	480.825.895	129	576.991.074	129	692.389.289		
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	84,09	80	1.007.819.6 70.924	30	1.209.745.1 27.220	30	1.451.415.919. 357	30	1.741.423.0 15.271	30	2.089.440.74 1.607		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	20,18	20,8		21		21,2		21,5		21,8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.1.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.726.123.9 96		3.166.634.8 99		3.690.940.216		4.314.655.6 48		5.057.390.78 9		
Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	43	43	2.726.123.9 96	43	3.166.634.8 99	43	3.690.940.216	43	4.314.655.6 48	43	5.057.390.78 9		
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.02.1.01.000 1 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				348.434.991		418.121.989		501.746.387		602.095.664		722.514.797		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	348.434.991	2	418.121.989	2	501.746.387	2	602.095.664	2	722.514.797		
5.02.02.1.01.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah				1.443.565.0 20		1.732.278.0 24		2.078.733.629		2.494.480.3 55		2.993.376.42 5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
tentang Penjabaran APBD														
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	1.443.565.0 20	2	1.732.278.0 24	2	2.078.733.629	2	2.494.480.3 55	2	2.993.376.42 5		
5.02.02.1.01.000 9 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				241.187.443		289.424.932		347.309.919		416.771.902		500.126.283		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2	2	241.187.443	2	289.424.932	2	347.309.919	2	416.771.902	2	500.126.283		
5.02.02.1.01.001 0 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				192.120.911		201.512.522		211.588.101		222.167.487		233.275.909		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan	2	2	192.120.911	2	201.512.522	2	211.588.101	2	222.167.487	2	233.275.909		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Anggaran Pendapatan	Anggaran Pendapatan (Dokumen)													
5.02.02.1.01.001 1 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				293.457.239		307.802.561		323.192.617		339.352.219		356.319.902		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2	2	293.457.239	2	307.802.561	2	323.192.617	2	339.352.219	2	356.319.902		
5.02.02.1.01.001 3 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi				207.358.392		217.494.871		228.369.563		239.788.021		251.777.473		
Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi (Orang)	43	43	207.358.392	43	217.494.871	43	228.369.563	43	239.788.021	43	251.777.473		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.02.1.02 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				1.366.021.2 10		1.613.350.5 59		1.909.081.325		2.262.611.3 12		2.685.433.04 4		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	11	11	1.027.953.7 31	11	1.220.607.0 31	11	1.451.258.764	11	1.727.367.3 78	11	2.057.990.58 8		
	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	11	11		11		11		11		11			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.1.02.0002 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota				430.880.943		517.057.132		620.468.558		744.562.270		893.474.723		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota (Laporan)	11	11	430.880.943	11	517.057.132	11	620.468.558	11	744.562.270	11	893.474.723		
5.02.02.1.02.0003 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				259.005.309		310.806.371		372.967.645		447.561.174		537.073.409		
Terlaksananya Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi	11	11	259.005.309	11	310.806.371	11	372.967.645	11	447.561.174	11	537.073.409		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)													
5.02.02.1.02.000 4 - Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				252.454.876		302.945.851		363.535.021		436.242.026		523.490.431		
Terlaksananya Evaluasi	Jumlah Laporan Evaluasi	11	11	252.454.876	11	302.945.851	11	363.535.021	11	436.242.026	11	523.490.431		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Laporan)													
5.02.02.1.02.0011 - Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota				85.612.603		89.797.677		94.287.540		99.001.908		103.952.025		
Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang	1	1	85.612.603	1	89.797.677	1	94.287.540	1	99.001.908	1	103.952.025		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Orang)													
5.02.02.1.05 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				1.001.319.1 43.236		1.201.849.4 57.941		1.442.146.656. 347		1.730.500.2 99.851		2.076.728.88 7.598		
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	4	4	1.001.319.1 43.236	4	1.201.849.4 57.941	4	1.442.146.656. 347	4	1.730.500.2 99.851	4	2.076.728.88 7.598		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)													
5.02.02.1.05.000 4 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	64.000.000	1	64.000.000	1	64.000.000	1	64.000.000	1	64.000.000		
5.02.02.1.05.000 8 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran				179.165.161 .000		215.277.479 .258		258.273.081.92 7		309.864.810 .547		371.979.100. 433		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bantuan Keuangan														
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	2	2	179.165.161 .000	2	215.277.479 .258	2	258.273.081.92 7	2	309.864.810 .547	2	371.979.100. 433		
5.02.02.1.05.000 9 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				121.000.000 .000		145.200.000 .000		174.240.000.00 0		209.088.000 .000		250.905.600. 000		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	121.000.000 .000	1	145.200.000 .000	1	174.240.000.00 0	1	209.088.000 .000	1	250.905.600. 000		
5.02.02.1.05.001 0 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				701.089.982 .236		841.307.978 .683		1.009.569.574. 420		1.211.483.4 89.304		1.453.780.18 7.165		
Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi (Laporan)	4	4	701.089.982 .236	4	841.307.978 .683	4	1.009.569.574. 420	4	1.211.483.4 89.304	4	1.453.780.18 7.165		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-16,17	-16,17	1.663.019.2 70	-16,17	1.986.240.4 32	-16,17	2.384.414.480	-16,17	2.877.686.3 19	-16,17	3.492.806.99 8		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	94,57	94,65		95,50		95,75		96,00		96,25			
5.02.02.1.03 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				3.226.037.540		3.972.480.864		4.768.828.960		5.755.372.638		6.778.254.203		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	33	33	1.663.019.270	33	1.986.240.432	33	2.384.414.480	33	2.877.686.319	33	3.492.806.998		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
5.02.02.1.03.000 1 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				258.540.735		310.248.882		372.298.658		446.758.390		536.110.068		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	258.540.735	12	310.248.882	12	372.298.658	12	446.758.390	12	536.110.068		
5.02.02.1.03.000 2 - Pengelolaan				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000		
5.02.02.1.03.000 3 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				316.677.760		380.013.312		456.015.974		547.219.169		656.663.003		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	12	12	316.677.760	12	380.013.312	12	456.015.974	12	547.219.169	12	656.663.003		
5.02.02.1.03.000 4 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				269.076.415		322.891.698		387.470.038		464.964.045		557.956.854		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	12	12	269.076.415	12	322.891.698	12	387.470.038	12	464.964.045	12	557.956.854		
5.02.02.1.03.000 5 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				68.724.360		103.086.540		154.629.810		231.944.715		347.917.073		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	4	4	68.724.360	4	103.086.540	4	154.629.810	4	231.944.715	4	347.917.073		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Lainnya (Dokumen)													
5.02.02.1.03.000 6 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		207.360.000		
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	144.000.000	12	172.800.000	12	207.360.000		
5.02.02.1.03.000 7 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		207.360.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pem otongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	144.000.000	12	172.800.000	12	207.360.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)													
5.02.02.1.03.000 8 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		207.360.000		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	144.000.000	12	172.800.000	12	207.360.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)													
5.02.02.1.03.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		207.360.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	12	100.000.000	12	120.000.000	12	144.000.000	12	172.800.000	12	207.360.000		
5.02.02.1.03.0010 - Penyusunan				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		207.360.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	144.000.000	1	172.800.000	1	207.360.000		
5.02.02.1.03.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100.000.000		120.000.000		144.000.000		172.800.000		207.360.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	33	33	100.000.000	33	120.000.000	33	144.000.000	33	172.800.000	33	207.360.000		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				6.096.000.0 00		7.010.000.0 00		8.602.000.000		9.271.000.0 00		10.662.000.0 00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	16,71	16,83	6.096.000.0 00	16,9	7.010.000.0 00	16,92	8.602.000.000	16,95	9.271.000.0 00	17	10.662.000.0 00	5.02.0.00.0.00. 01.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5.02.03.1.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				6.096.000.0 00		7.010.000.0 00		8.602.000.000		9.271.000.0 00		10.662.000.0 00		
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		12	6.096.000.0 00	12	7.010.000.0 00	12	8.602.000.000	12	9.271.000.0 00	12	10.662.000.0 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Standar Harga yang	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Disusun (Dokumen)													
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.02.03.1.01.000 1 - Penyusunan Standar Harga				360.888.662 ,11		414.998.281 ,07		509.246.107,53		548.851.506 ,96		631.199.953, 32		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2	360.888.662 ,11	2	414.998.281 ,07	2	509.246.107,53	2	548.851.506 ,96	2	631.199.953, 32		
5.02.03.1.01.000 2 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				15.575.463, 13		17.910.760, 59		21.978.368,42		23.687.683, 51		27.241.730,3		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	15.575.463,13	2	17.910.760,59	2	21.978.368,42	2	23.687.683,51	2	27.241.730,3		
5.02.03.1.01.0003 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				99.298.287,79		114.186.515,32		140.118.745,33		151.016.146,01		173.674.269,09		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	99.298.287,79	2	114.186.515,32	2	140.118.745,33	2	151.016.146,01	2	173.674.269,09		
5.02.03.1.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				290.948.145,04		334.571.275,71		410.553.796,53		442.483.637,25		508.872.887,54		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	290.948.145,04	1	334.571.275,71	1	410.553.796,53	1	442.483.637,25	1	508.872.887,54		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.02.03.1.01.000 5 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				761.980.296 ,2		876.227.341 ,92		1.075.222.196, 18		1.158.845.0 33,81		1.332.715.53 7,75		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12	761.980.296 ,2	12	876.227.341 ,92	12	1.075.222.196, 18	12	1.158.845.0 33,81	12	1.332.715.53 7,75		
5.02.03.1.01.000 6 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				1.866.177.7 79,75		2.145.981.9 94,1		2.633.343.382, 78		2.838.145.3 73,37		3.263.974.32 5,41		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	6	6	1.866.177.7 79,75	6	2.145.981.9 94,1	6	2.633.343.382, 78	6	2.838.145.3 73,37	6	3.263.974.32 5,41		
5.02.03.1.01.000 7 - Pengamanan Barang Milik Daerah				825.860.178 ,66		949.685.015 ,16		1.165.362.410, 9		1.255.995.6 88,38		1.444.442.45 8,15		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12	825.860.178 ,66	12	949.685.015 ,16	12	1.165.362.410, 9	12	1.255.995.6 88,38	12	1.444.442.45 8,15		
5.02.03.1.01.000 8 - Penilaian				82.985.204, 01		95.427.539, 38		117.099.528,36		126.206.664 ,43		145.142.428, 66		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Milik Daerah														
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	82.985.204,01	4	95.427.539,38	4	117.099.528,36	4	126.206.664,43	4	145.142.428,66		
5.02.03.1.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				326.348.853,17		375.279.767,18		460.507.354,82		496.322.214,2		570.789.283,55		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	326.348.853,17	4	375.279.767,18	4	460.507.354,82	4	496.322.214,2	4	570.789.283,55		
5.02.03.1.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan				392.192.285,49		450.995.393,91		553.418.313,61		596.459.100,84		685.950.483,57		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Milik Daerah														
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	12	12	392.192.285,49	12	450.995.393,91	12	553.418.313,61	12	596.459.100,84	12	685.950.483,57		
5.02.03.1.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				290.948.145,04		334.571.275,71		410.553.796,53		442.483.637,25		508.872.887,54		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	290.948.145,04	2	334.571.275,71	2	410.553.796,53	2	442.483.637,25	2	508.872.887,54		
5.02.03.1.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				552.632.673,46		635.491.312,5		779.814.018,56		840.462.190,89		966.563.248,77		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA NGAN
			2025		2026		2027		2028		2029			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	552.632.673 ,46	1	635.491.312 ,5	1	779.814.018,56	1	840.462.190 ,89	1	966.563.248, 77		
5.02.03.1.01.001 3 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				230.164.026 ,15		264.673.527 ,45		324.781.980,45		350.041.123 ,1		402.560.506, 35		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		12	230.164.026 ,15	12	264.673.527 ,45	12	324.781.980,45	12	350.041.123 ,1	12	402.560.506, 35		

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	TabelProgram Prioritas	1 4. 3 Daftar Sub kegiatan PrOutcome	Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kegiatan / Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH	<i>Meningkatnya tata Kelola anggaran</i>	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasiserta Kebijakan Bidang Anggaran	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/Kota	

			<i>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	
		<i>Meningkatnya tata Kelola perbendaharaan</i>	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	

Penatausahaan Pembiayaan Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
<i>Meningkatnya tata kelolaakuntansi dan pelaporan</i> Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban
Penatausahaan Barang Milik Daerah
Inventarisasi Barang Milik Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah
Penilaian Barang Milik Daerah
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Formulasi	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Persentase Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	(Total belanja dalam realisasi ÷ total belanja APBD) x 100%	%	95	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Formulasi	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Opini BPK	Opini	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKAD Provinsi Jambi, dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra ini menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, sekaligus alat untuk mengarahkan tujuan dan menjadi titik awal proses akuntabilitas kinerja BKAD Provinsi Jambi.

Keberhasilan pembangunan yang menjadi tanggung jawab BKAD Provinsi Jambi dalam mendukung terwujudnya visi Provinsi Jambi **“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”** sangat memerlukan dukungan komitmen yang kuat dari seluruh sektor, konsistensi dalam kebijakan dan implementasi, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha.

Renstra ini bersifat indikatif dan akan menjadi pedoman evaluasi kinerja BKAD Provinsi Jambi selama periode 2025-2029, dengan tetap membuka ruang penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renstra apabila terjadi perubahan kebijakan nasional/daerah yang bersifat mendasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.